

Analisis Konsep *Service Learning* Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Agil Nanggala dan Karim Suryadi

Universitas Pendidikan Indonesia

Email Korespondensi: agilnanggala@upi.edu

ABSTRAK

Service learning menjadi model pembelajaran yang perlu untuk dioptimalkan dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang beradab, karena berorientasi untuk memberikan pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa dan memiliki manfaat positif bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini dilaksanakan, adalah untuk memberikan rasionalisasi, mengenai relevannya model *service learning* dikolaborasikan dan dielaborasi dengan Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Analisis data dalam penelitian ini meliputi: reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapatkan, adalah: 1) Model *service learning*, berperan dalam memperkuat kompetensi kewarganegaraan milik mahasiswa, sehingga selaras dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, yang juga memiliki orientasi untuk memperkuat kompetensi kewarganegaraan bagi mahasiswa 2) Model *service learning*, mampu memperkuat keterlibatan mahasiswa, karena merupakan pembelajaran langsung dimasyarakat, proses keterlibatan mahasiswa tersebut, pada umumnya difokuskan pada tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, tentu keterlibatan mahasiswa merepresentasikan warga negara yang baik dan cerdas.

Kata Kunci: *Service Learning*, Pendidikan Kewarganegaraan, Kompetensi Kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Kampus merdeka merupakan pembaharuan kebijakan, yang diberlakukan oleh Menteri Nadiem Makarim. Tentu kebijakan tersebut, memiliki orientasi dalam menyelaraskan kebutuhan serta tantangan zaman saat ini, dengan realitas pendidikan Indonesia. Khususnya pada tujuan membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter, berdaya saing dan unggul. Idealnya kebijakan pendidikan Indonesia, pada substansi tujuannya, perlu dianalisis serta direfleksikan melalui keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, agar

meminimalisir terjadinya ketimpangan antara cita-cita program tersebut dengan realitasnya.

Melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, dijelaskan bahwa salah satu bentuk pembelajaran dari kebijakan kampus merdeka adalah KKN tematik atau membangun desa. Melalui realitas tersebut bisa disimpulkan bahwa *service learning* merupakan salah satu bentuk pembelajaran, bahkan orientasi dari kebijakan kampus merdeka. *Service learning* mengakomodir mahasiswa untuk melakukan pembelajaran langsung dimasyarakat, menumbuhkan kepekaan sosial bagi

mahasiswa, serta mengetahui ketimpangan mengenai teori yang didapat dalam perkuliahan dengan realitas di lapangan. Fatchiya dan Jakaria (2018: 109) menegaskan bahwa KKN merupakan kegiatan *service learning*, karena melakukan pembelajaran berbasis melayani, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, serta menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat tersebut.

Tentu, pada era modern ini saat ini, pembelajaran tidak cukup dilaksanakan di dalam kelas saja. Tetapi juga di luar kelas, agar pembelajaran mahasiswa menjadi lebih bermakna, karena mahasiswa tersebut mampu menganalisis dan merefleksikan realitas sesungguhnya, sebagai upaya untuk menumbuhkan kepekaan sosialnya. Sehingga mahasiswa tersebut memiliki modal sosial yang baik, apabila suatu saat nanti, akan kembali kepada kehidupan masyarakat, bahkan mampu memiliki peran strategis, dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Kegiatan *service learning* harus mulai dipandang sebagai program penting, setiap perguruan tinggi, dalam membentuk karakter mahasiswanya, agar mewakili sifat yang pancasilais.

Service learning, menjadi model pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap peduli sosial dan lingkungan bagi pelajar (Kasi, dkk, 2018: 438). Sebagai salah satu bentuk pembelajaran, dalam kebijakan

kampus merdeka, tentu model *service learning* diharapkan mampu menjadi solusi ilmiah. Khususnya untuk mengatasi permasalahan mengenai karakter generasi muda dan upaya membentuk masyarakat yang berdaya. Didukung oleh realitas, bahwa masyarakat Indonesia sifatnya beragam, dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga pemerintah tidak bisa sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan umum, perlu keterlibatan semua pihak, khususnya kaum intelektual.

Keterlibatan kaum intelektual, dalam upaya menyelesaikan persoalan masyarakat, menjadi sebuah tanggung jawab. Karena merupakan tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, sehingga perguruan tinggi wajib untuk melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Selain hal tersebut, juga agar upaya menyelesaikan masalahnya berbasis ilmiah, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Tentu pengembangan keilmuan nasional harus didasari oleh nilai-nilai Ketuhanan serta nilai-nilai kemanusiaan.

Model *service learning* tersebut, idealnya dianalisis tujuan dan substansinya melalui Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai upaya untuk memperkaya keilmuan nasional. Tidak hanya berfokus pada tujuan tersebut, tetapi juga untuk

melakukan kolaborasi dan elaborasi model *service learning* dengan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga pada tataran praksisnya, model tersebut tidak bersifat prosedural dan pragmatis. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki keterkaitan dengan model *service learning*, khususnya pada upaya memberikan pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa, sekaligus memperkuat kompetensi kewarganegaraan mahasiswa tersebut (Karliani, 2014: 77)

Sebagai keilmuan dan pembelajaran yang berfokus pada upaya membentuk warga negara Indonesia yang baik serta cerdas. Tentu Pendidikan Kewarganegaraan mampu menjadi rujukan nasional dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat secara holistik. Dengan rasionalisasi bahwa fokus kajiannya bergitu komprehensif, juga memiliki dimensi keilmuan yang beragam, yaitu PKn pembelajaran, PKn akademik, dan PKn kemasyarakatan. Winataputra (2016: 18) memaparkan pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kompetensi keilmuan yang mumpuni dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa Indonesia, karena memiliki dimensi kurikuler, akademik, serta sosio-kultural.

Faktanya, selain didasari oleh tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, juga diperkuat oleh dimensi keilmuannya, yaitu sosio-kultural,

yang pada substansinya menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat. Tidak terbatas pada orientasi tersebut, juga, sebagai bentuk kajian Pendidikan Kewarganegaraan, yang memiliki orientasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dimasyarakat, memberdayakannya, bahkan memperkuat keterlibatannya. Sehingga diperlukan peran nyata dari kaum intelektual, khususnya mahasiswa, agar tidak sebatas menjadi cita-cita. Aulia dan Arpanudin (2019: 10) menjelaskan pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan, menjadi sebuah kajian kemasyarakatan, yang memiliki tujuan dalam mewujudkan masyarakat madani, sehingga demokratis, sejahtera, adil dan berdaya.

Dijelaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, bahwa tujuan program KKN tematik atau membangun desa adalah untuk membentuk sikap kepemimpinan mahasiswa, mengoptimalkan potensi desa, memberikan pembelajaran bermakna bagi mahasiswa, serta upaya memberdayakan masyarakat. Tentu tujuan tersebut memiliki relevansi nyata dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, yang berfokus untuk membentuk warga negara yang beradab (*civic virtue*). Sebagai bagian ilmu sosial, Pendidikan Kewarganegaraan, memiliki temuan, konsep dan teori

yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat. Idealnya realitas tersebut menjadi telaah akademik bagi mahasiswa, untuk mengupayakan program *service learning*, yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.

Masalah sosial terus terjadi, bahkan semakin kompleks, sehingga kajian ilmu pengetahuan harus adaptif serta tanggap, dalam mengatasi realitas tersebut. Tentu salah satu bentuk pembelajaran efektif dalam mengatasi masalah tersebut, adalah *service learning*, yang dikolabirasikan dengan Pendidikan Kewarganegaraan, agar memiliki manfaat yang komprehensif, baik untuk masyarakat, mahasiswa, maupun lingkungan. Penting dalam melaksanakan kajian ilmiah tersebut, sebagai informasi argumentatif, agar pelaksanaan *service learning* tidak bersifat prosedural, terlebih pragmatis. Tetapi nyata sebagai wahana untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia, juga sebagai upaya memperkuat kompetensi kewarganegaraan mahasiswa.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan relevansi ilmiah, mengenai tujuan KKN tematik atau membangun desa sebagai model *service learning* dengan Pendidikan

Kewarganegaraan. Mengingat kedua konsep pembelajaran tersebut, berfokus pada upaya kemanusiaan dan kebangsaan. Penelitian kualitatif bersifat natural, mendalam dan elaboratif, karena tidak dibatasi melalui kategori tertentu.

Sumber literatur dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer difokuskan pada jurnal karena memiliki sifat keabsahan yang sangat baik. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi negara, agar meminimalisir terjadinya kesalahan yang sifatnya prosedural. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman (1992) yaitu: reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1) Tujuan dan Substansi Model *Service Learning* Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?

Faktanya model *service learning* memberikan kesempatan bagi mahasiswa, untuk melakukan pembelajaran langsung dimasyarakat. Dengan tujuan mendapatkan pengalaman berharga, menumbuhkan sikap sukarela dan kepekaan sosial mahasiswa. Pembelajaran langsung pada masyarakat menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk mengetahui jarak antara teori dan praktik, di dalam kehidupan yang sesungguhnya.

Tentu *model service learning* menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah *softskill* dan *hardskill*, yang merupakan kebutuhan pada era modern saat ini.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa, tentu memiliki peran penting, dalam upaya membentuk sumber manusia yang berdaya saing, unggul dan berkarakter. Sehingga keilmuan tersebut, perlu dikolaborasikan dengan model *service learning*, karena berkaitan langsung dengan masyarakat. Dengan dibekali modal, berupa kajian ilmiah yang komprehensif, tentu akan mempermudah mahasiswa, melaksanakan model *service learning*. Khususnya dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi efektif, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, komunikasi dengan masyarakat, dan evaluasi kegiatan yang berbasis ilmiah.

Dalam permendikbud No. 3 Tahun 2020, dijelaskan bahwa, tujuan dari KKN tematik atau membangun desa, adalah menyelesaikan masalah sosial, membentuk karakter mahasiswa, dan memberdayakan potensi desa. Tentu tujuan umum tersebut, memiliki relevansi dengan Pendidikan Kewarganegaraan, karena menghendaki terwujudnya masyarakat madani (yang dicita-citakan). Tidak terbatas pada upaya mempermudah mahasiswa melaksanakan *service learning*, tetapi

juga turut menjadi wahana pendidikan hukum dan politik bagi masyarakat umum, karena Pendidikan Kewarganegaraan bersifat interdisipliner. Suradi (2019: 118) mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan membahas berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat, serta berusaha mengatasinya, melalui pendekatan keilmuan, karena merupakan pendidikan hukum dan politik bagi masyarakat.

Selain relevansi dari antara tujuan *service learning* dan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, juga diperkuat melalui relevansi tujuan dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa. Branson (dalam Pangalila, 2017, hlm. 73) menjelaskan kompetensi kewarganegaraan pada dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) *civic knowledge* (pengetahuan dan wawasan warga negara), 2) *civic disposition* (watak, nilai dan sikap warga negara), 3) *civic skills* (keterampilan dan keahlian warga negara). Melalui *service learning*, tentu mampu menumbuhkan kompetensi kewarganegaraan tersebut, pada diri mahasiswa. Dengan orientasi mewujudkan warga negara yang beradab.

Dalam konteks *civic knowledge* lebih berfokus pada pengetahuan serta wawasan warga negara. Tentu *service learning* perlu menjadi wahana dalam memperkuat *civic knowledge* mahasiswa, karena

merupakan bentuk pembelajaran langsung dimasyarakat. Sehingga mereka bisa mengetahui hak dan kewajibannya, sebagai warga negara, yang cerdas. Arifin dan Munfaridah (2017: 117) menjelaskan bahwa model *service learning* mampu memperkuat pengetahuan kaum pelajar, karena merupakan pembelajaran langsung dimasyarakat, sehingga mengakomodir terjadinya pertukaran pengetahuan dan menambah pengalaman bagi kedua belah pihak.

Service learning memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa, untuk melaksanakan pembelajaran langsung pada masyarakat, sehingga memiliki berbagai kelebihan. Termasuk untuk mendapatkan pengetahuan yang tidak diajarkan di dalam ruang perkuliahan. Khususnya pada aspek pengalaman berharga, yang menjadi modal sosial bagi mahasiswa untuk merintis jalan kesuksesannya, kelak nanti. Membentuk mahasiswa yang memiliki pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang mumpuni, merupakan konsekuensi logis, apabila ingin menjadikan Indonesia, sebagai negara yang maju.

Pada aspek *civic disposition* lebih berfokus pada nilai, sikap dan watak warga negara. Idealnya *service learning* menjadi wahana dalam membentuk katakter bagi mahasiswa, agar memiliki kepekaan sosial, sikap sukarela, tanggung jawab, sehingga melahirkan warga negara yang

bijaksana. Model *service learning*, memiliki berbagai kelebihan dalam membentuk mahasiswa agar memiliki karakter pancasilais. *Service learning* merupakan model pembelajaran yang berperan dalam membentuk karakter dan nilai terpuji mahasiswa (Amran dan Ishak, 2017: 1).

Civic disposition atau sikap, nilai dan watak warga negara, begitu penting untuk dihabituisasikan kepada mahasiswa sebagai generasi muda. Termasuk landasan integritas dan moralitas untuk melakukan partisipasi publiknya. Tentu model *service learning* mengakomodir mahasiswa dalam membentuk karakter terpujinya, karena merupakan bentuk pembelajaran langsung dimasyarakat, yang memberikan realitas kepada mahasiswa, untuk mengetahui kompleksnya permasalahan masyarakat, realitas ketidakadilan, kesenjangan sosial, pendidikan. Sehingga memantik lahirnya sikap, nilai dan watak mahasiswa, yang menjadi modal, dalam mewujudkan bangsa yang beradab.

Dalam konteks *civic skills*, tentu lebih berfokus pada keterampilan, keahlian atau kecakapan warga negara. Nyatanya model *service learning*, mampu menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah berbagai keterampilannya, yang dibagi menjadi *softskill* maupun *hardskill*. Tentu keterampilan tersebut tidak diajarkan di dalam ruang perkuliahan, karena berfokus pada orientasi

teoritis, tetapi *civic skills* begitu penting dikuasai mahasiswa, sebagai modal dalam menghadapi kemajuan zaman, yang menuntut setiap individu menguasai keterampilan yang beragam. Syamsudduha & Tekeng (2017: 16) menjelaskan bahwa model *service learning*, berperan dalam membentuk keahlian mahasiswa, seperti komunikasi, kreatifitas, inovasi, sinergitas, manajemen, memecahkan masalah, dan yang lainnya.

Melalui *model service learning*, diharapkan mampu menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan kewarganegaraannya atau *civic skills*. Tentu modernisasi saat ini, mengakibatkan setiap individu harus memiliki berbagai keahlian, karena sifatnya kompetitif. *Service learning* memberikan ruang gerak lebih bagi mahasiswa untuk berekspresi, mengeksplorasi dirinya, sebagai upaya memperkuat keterampilannya yang akan berguna kelak nanti, dalam pembelajaran langsung dimasyarakat, tentu mahasiswa dilatih keterampilannya, sesuai minat dan bakat miliknya, karena dalam *service learning* yang diutamakan adalah niat mengabdikan serta proses, mengenai hasil, merupakan buah dari kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah setempat dan yang lainnya. Wadud, dkk (2020, hlm. 122) menegaskan mengenai pentingnya untuk menguasai keterampilan kewarganegaraan, di era modern,

selain menjadi nilai jual bagi individu, juga merupakan modal sosial dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Berdasarkan informasi argumentatif tersebut, diketahui bahwa model *service learning* mampu memperkuat kompetensi kewarganegaraan, karena melaksanakan pembelajaran langsung pada masyarakat. Faktanya *service learning*, membutuhkan, keterlibatan dari berbagai pihak, seperti, mahasiswa, masyarakat, pemerintah, pers dan swasta, agar menumbuhkan kolaborasi dan sifatnya efektif dalam menyelesaikan kompleksnya permasalahan. Terlebih bagi mahasiswa, tentu menjadi wahana untuk mengembangkan kompetensi miliknya, dan menjadi pembelajaran yang berdampak positif dan bermakna bagi mahasiswa. Kajian ilmu pengetahuan pada era modern saat ini, perlu menjadikan realitas sosial sebagai sumber analisis pembelajarannya, agar memiliki kontribusi ilmiah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, sejahtera, adil dan beradab.

2) Memperkuat Keterlibatan Mahasiswa Melalui Service Learning?

Dalam upaya mewujudkan bangsa Indonesia yang demokratis dan beradab, tentu keterlibatan warga negara begitu penting, karena merupakan praktik dari integritas dan

moralitas individu. Sehingga proses membentuk warga negara yang secara sukarela terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, perlu dilakukan kepada mahasiswa, karena kapasitasnya sebagai generasi penerus bangsa. Model *service learning*, begitu relevan untuk menjadi wahana dalam memperkuat keterlibatan mahasiswa, karena pada tataran praksis pembelajarannya, bersifat aktivitas dengan masyarakat, mengutamakan proses guna memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat, bahkan berfokus pada upaya pemberdayaannya. Faktanya, dalam model tersebut, dibutuhkan inovasi, komunikasi, tanggap, kepekaan sosial dari mahasiswa, guna meminimalisir terjadinya pembelajaran, yang tidak memiliki makna dan tidak memiliki manfaat positif.

Keterlibatan warga negara, menjadi konsep yang menghendaki peran nyata dari warga negara, pada proses sosial dan politik yang terjadi dimasyarakat, sebagai bentuk demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Nanggala, 2020: 2). Dalam konteks keterlibatan generasi muda, tentu tataran implementasinya lebih beragam dan inovatif, karena merupakan sifat alami dari generasi tersebut. Didukung oleh kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, mengakibatkan semakin beragamnya pilihan bagi generasi muda untuk melakukan

keterlibatan publiknya. Tentu mahasiswa sebagai generasi muda perlu memandang bahwa, mereka memiliki peran penting dalam membawa bangsa menuju puncak peradabannya.

Mahasiswa memiliki peran penting dalam memastikan demokratisasi terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bukan tanpa sebab, karena mereka merupakan suara dan hati masyarakat, dalam menyikapi realitas ketidakadilan. Sehingga perlu keterlibatan mereka, agar meminimalisir ketimpangan antara cita-cita dan realitas, tentu proses keterlibatan tersebut tidak selalu berbentuk unjuk rasa atau yang sejenisnya, tetapi juga bisa melalui pembelajaran dan pengabdian langsung dimasyarakat. Yunita dan Suryadi (2018: 230) mengungkapkan mahasiswa memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam upaya terwujudnya integrasi nasional, maupun upaya memajukan kehidupan bangsa.

Model *service learning*, menjadi alternatif solusi dalam upaya memperkuat keterlibatan mahasiswa, karena memiliki beberapa kelebihan, seperti demokratis, bersifat langsung serta berbasis masalah. Sehingga model *service learning*, begitu mengutamakan keterlibatan mahasiswa dalam implementasi pembelajarannya. Idealnya sebelum melaksanakan *service learning*, mahasiswa melakukan observasi

terlebih dahulu, agar dalam penyusunan program *service learning* tersebut, efektif dan efisien, karena memiliki latar belakang masalah yang jelas. Tetapi, apabila telah dilakukan penjabaran masalah oleh pihak yang berwenang dalam mengelola KKN sebagai bentuk *service learning*, mahasiswa bisa melakukan elaborasi masalah, bahkan melakukan kaborasi dengan berbagai pihak, untuk menyelesaikan masalah yang telah dianalisis sebelumnya.

Nusanti (2014: 255) menjelaskan tahap dari *service learning*, terbagi menjadi 3, yaitu: tahap persiapan, tahap melayani dan tahap refleksi. Model *service learning* begitu menghendaki adanya perubahan, baik perubahan kepada mahasiswa, pada aspek penguatan pengetahuan, sikap serta keterampilan, maupun kepada masyarakat, pada aspek penyelesaian masalah sosial dan pemberdayaannya. Bentuk keterlibatan dari mahasiswa pada model *service learning*, pada umumnya yaitu melayani, dalam artian memberikan sumbangsih pemikiran serta tindakan nyata demi kesejahteraan masyarakat, dengan didasari oleh berbagai teori yang didapatkan di dalam perkuliahan. Sehingga pada proses melayani masyarakat tersebut, tentu diperlukan kesadaran dan kesukarelaan dari mahasiswa, agar menjadi pengalaman sekaligus keterampilan, yang merupakan investasi sosial.

Tentu, keterlibatan warga negara pun, menjadi orientasi dan substansi dari Pendidikan Kewarganegaraan, karena memberikan informasi objektif, mengenai pentingnya menjadi warga negara yang baik dan cerdas, serta paham akan hak dan kewajibannya. Melaksanakan keterlibatan publik merupakan implementasi praksis, dari konsep warga negara yang baik dan cerdas tersebut. Sehingga tidak berfokus pada aspek konsep saja, tentu Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai kajian dalam memperkuat karakter bangsa, idealnya memandang bahwa proses implementasi dari berbagai temuan, konsep, teori yang berkaitan dengan keilmuan tersebut, harus memiliki orientasi pada aspek praksis atau implementasi, karena ilmu yang baik serta bermanfaat adalah yang diamalkan. Tentu Pendidikan Kewarganegaraan, berperan dalam memperkuat keterlibatan warga negara, sebagai upaya dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis (Yuniarto, 2020: 70).

Relevannya *service learning* untuk memperkuat keterlibatan warga negara, karena pada praksisnya memberikan ruang lebih pada mahasiswa dalam melaksanakan tahap persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan. Didukung oleh bimbingan dari pihak yang berwenang, khususnya dosen, agar pelaksanaan *service learning* lebih

optimal, karena kompetensi pengetahuan dan keahlian dosen sudah tidak perlu untuk dipertanyakan lagi. Tentu bimbingan yang dimaksud, lebih kepada upaya memberikan masukan serta usul, agar *service learning* mampu menjadi jawaban atas berbagai permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Berbagai sumbangsih pemikiran dosen, yang diberikan kepada mahasiswa, agar *service learning* berjalan efektif, tidak akan pernah memiliki dampak, apabila tidak ada tindak lanjut atau inisiatif dari mahasiswa terkait, karena berhasil atau tidaknya model *service learning*, begitu tergantung pada keterlibatan mahasiswa.

Pada aspek persiapan model *service learning*, tentu menjadi hal yang penting, karena menjadi sarana dalam menyusun berbagai program kemasyarakatan, berbasis masalah sosial, pemberdayaan masyarakat, dan temuan ilmiah. Keterlibatan mahasiswa pada tahap persiapan *service learning* yaitu, mengamati pola kehidupan masyarakat, menelaah permasalahan, mengidentifikasi potensi desa, dan melakukan komunikasi awal dengan masyarakat. Penting dalam mengoptimalkan tahap persiapan model *service learning*, karena menjadi strategi pelaksanaan, gambaran kegiatan, bahkan menjadi kesan pertama, baik untuk masyarakat, maupun pemerintah, karena mahasiswa melakukan komunikasi awal. Adriel, dkk (2020:

57) mengungkapkan bahwa tahap persiapan *service learning* begitu penting, karena menjadi rujukan dalam melaksanakan model tersebut, juga merupakan hasil dari rancangan bersama.

Tahap pelaksanaan menjadi bagian paling penting pada model *service learning*, karena sifatnya implementasi langsung dari strategi dan pendekatan *service learning* yang telah disusun serta disepakati oleh mahasiswa terkait. Pada tahap pelaksanaan tentu mahasiswa dilibatkan dalam berbagai program *service learning*, secara sukarela dengan tujuan untuk melayani masyarakat, karena model tersebut, tidak bersifat profit. Tahap pelaksanaan merupakan inti dari model *service learning*, tentu optimal atau tidaknya tahap pelaksanaan model *service learning*, terlihat dari tahap pelaksanaan model tersebut, pada dasarnya dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari mahasiswa untuk mengabdikan atau melayani. Proses pelaksanaan, merupakan inti dari *service learning*, yang pada realitasnya melibatkan berbagai pihak, sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang berdaya (Sunaryo, dkk, 2019: 51).

Pada tahap evaluasi, lebih berfokus untuk menelaah dan merefleksikan, serta menilai pelaksanaan dari *service learning*. Tentu tahap evaluasi dilaksanakan setelah diselesaikannya tahap pelaksanaan *service learning*,

keterlibatan mahasiswa dalam tahap evaluasi, lebih kepada memberikan solusi, kritik, saran dan usul, sebagai bentuk rekomendasi untuk pelaksanaan *service learning* selanjutnya. Idealnya evaluasi tersebut, harus dilaporkan dalam file yang formatnya ditentukan oleh pihak berwajib, sebagai bentuk dokumentasi serta menjadi acuan resmi, mengenai rekomendasi, untuk penyusunan dan pelaksanaan model *service learning* kelak nanti, agar bersifat efektif dan berkelanjutan, walau masalah yang ada dimasyarakat, sifatnya dinamis, sehingga, minimalnya menjadi bahan pembelajaran dan pertimbangan mahasiswa, agar lebih bijaksana dalam menentukan programnya. Proses evaluasi dalam model *service learning*, menjadi sarana untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan pelaksanaan model tersebut, setelah evaluasi selesai, perlu dijadikan dokumen yang berisikan rekomendasi, sebagai upaya perbaikan ke depannya, yang disusun bersama, sehingga sifatnya komprehensif (Sutanto, dkk, 2020: 54).

Melalui informasi argumentatif tersebut, diketahui bahwa *service learning* mampu memperkuat keterlibatan warga negara, khususnya mahasiswa. Faktanya keterlibatan warga negara, menjadi konsep yang kompleks, tidak terbatas pada pesta demokrasi saja, melainkan pada berbagai aspek

kehidupan, termasuk pada peran nyata dari mahasiswa dalam membawa bangsa menuju puncak peradabannya. Tentu *Service learning* sebagai model pembelajaran langsung bagi mahasiswa dimasyarakat, menjadi wahana dalam memperkuat kompetensi kewarganegaraan mahasiswa serta melakukan pemberdayaan masyarakat, melalui optimalisasi potensi desa, serta menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi. Mahasiswa memiliki tugas yang berat, karena menjadi gerakan moral masyarakat, terlebih pada realitas bahwa mereka akan menjadi pemimpin bangsa pada masa yang akan datang, tentu harus dipersiapkan sebaik mungkin, salah satu strategi efektifnya adalah melalui model *service learning*, karena sifatnya yang komprehensif.

SIMPULAN

Model *service learning* memiliki relevansi dengan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, pada aspek tujuan dan substansi pembelajarannya, dengan realitas bahwa keduanya memiliki kapasitas dalam memperkuat kompetensi kewarganegaraan mahasiswa. Relevannya model *service learning*, dalam memperkuat kompetensi kewarganegaraan, karena mengakomodir pembelajaran langsung bagi mahasiswa dimasyarakat. Sehingga pembelajarannya menjadi bermakna dan memiliki manfaat positif, tentu

kompetensi yang dimaksud adalah, *civic knowledge*, *civic disposition*, dan *civic skills*. Idealnya model *service learning* perlu dioptimalkan oleh semua perguruan tinggi, agar mewujudkan warga negara yang beradab (*civic virtue*).

Dalam memperkuat keterlibatan warga negara, tentu model *service learning* begitu relevan, karena memiliki orientasi untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa dalam implementasinya. Pada umumnya, upaya memperkuat keterlibatan mahasiswa dalam model *service learning*, berfokus pada tiga aspek, yaitu persiapan, pelaksanaan,

evaluasi. Tentu keterlibatan mahasiswa dalam model tersebut, bersifat sukarela, untuk melayani dan mengabdikan, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya. Terlibatnya mahasiswa pada kegiatan masyarakat, menjadi representasi warga negara yang baik dan cerdas, tentu tujuan tersebut selaras dengan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga Indonesia tidak kekurangan generasi muda yang memiliki integritas dan moralitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriel, J. A. Reynalda, O. T. Nathanael, D. W. & Hermawan, S. (2020). Lingkungan adalah Seorang Guru (Refleksi Pemberdayaan terhadap Lingkungan melalui Program *Service Learning*). *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM17)*. 5 (1). Hlm. 54-58.
- Arifin, S. & Munfaridah, M. (2017). Pengembangan Desain Konseling Berbasis Pesantren dengan Pendekatan *Service-Learning*. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*. 8 (2). Hlm. 110-132.
- Amran, N. N. & Ishak, H. B. (2017). *Service-Learning* Bersama OKU: Pengalaman Latihan Industri Pelajar FPI, UKM. *Jurnal Al-Turath*. 2 (1). Hlm. 1-9.
- Aulia, S. S. & Arpanudin, I. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Lingkup Sosiokultural Pendidikan Non-Formal. *Jurnal Civic Education*. 3 (1). Hlm. 1-12.
- Fatchiya, A. & Jakaria. (2018). Peningkatan Keberdayaan Peternak Berbasis Potensi Masalah Lokal melalui Kuliah Kerja Nyata. *Jurnal Argokreatif*. 4 (2). Hlm. 109-117.
- Karliani, E. (2014). Membangun *Civic Engagement* Melalui Model *Service Learning* untuk Memperkuat Karakter Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 23 (2). Hlm. 71-78.
- Kasi, K. Sumartini. & Astina, K. (2018). Pengaruh Model Pembelajaran *Service Learning* terhadap Sikap Peduli Lingkungan. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*. 3 (4). Hlm. 437-440.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nanggala, A. (2020). Peran Tradisi Irung-Irung dalam Memperkuat *Civic Engagement* Generasi Muda di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 5 (1). Hlm. 1-16.
- Nusantri, I. (2014). Strategi *Service Learning* sebuah Kajian untuk Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 20 (2). Hlm. 251-260.

- Pangalila, T. (2017). Peningkatan *Civic Disposition* Siswa melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 7 (1). Hlm. 91-103.
- Sunaryo, C. F. Tedja, M. A. Magdalena, J. Liady, M. C. & Mulyono, G. (2019). Gerobak “Mantap” untuk *Service-Learning* UKM Kampung Unggulan Kue. *SHARE (Journal of Service Learning)*. 4 (2). Hlm. 50-55.
- Suradi, L. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai dan Pendidikan Hukum dalam Mewujudkan Warga Negara yang Cerdas dan Baik (*Smart and Good Citizen*). *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*. 14 (2). Hlm. 112-121.
- Sutanto, E. Vincentia, M. & Thamrin, D. (2020). Ideasi Desain Interior dan Terapan *Styling Interior* Pada *Basecamp* Komunitas Doodle Art Surabaya. *SHARE (Journal of Service Learning)*. 6 (1). Hlm. 53-56.
- Syamsudduha, S. & Tekeng, N. Y. (2017). Penerapan *Service Learning* dalam Pembelajaran Mata Kuliah Pedagogik pada Kurikulum Pendidikan Calon Guru. *Lentera Pendidikan*. 20 (1). Hlm. 1-17.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Wadu, L. B. Ladamay, I. & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 10 (1). Hlm. 116-125.
- Winataputra, U. S. (2016). Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. 1(1). Hlm. 15-36.
- Yuniarto, B. (2020). Membangun Kesadaran Demokrasi melalui Pendekatan Kontekstual pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Edukos: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi*. 9 (1). Hlm. 56-72.
- Yunita. & Suryadi, K. (2018). Rancang Bangun Pendidikan Bela Negara sebagai Wahana Pengembangan Sikap Nasionalisme bagi Mahasiswa. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*. 5 (2). Hlm. 2230-237.